

**PENGATURAN PENETAPAN STATUS BURON BAGI SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT NON
ANGGOTA STATUTA ROMA 1998**

Oleh:

Putu Nandita Utami, NIM 2114101204

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu: 1) menyelidiki dan menganalisis peraturan mengenai judicial review penetapan status buronan bagi subjek hukum internasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat, khususnya mereka yang bukan merupakan penandatanganan Statuta Roma 1998; dan 2) untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan individu yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan namun juga bukan merupakan anggota Statuta Roma 1998, serta untuk mengidentifikasi mekanisme untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang melibatkan non-anggota tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mencakup berbagai pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang menjadi landasan analisis kami. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Statuta Roma 1998 dan Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kewenangan untuk menetapkan status buronan individu subjek hukum internasional yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang menimbulkan kerugian dan korban di negaranya masing-masing. Penetapan tersebut harus berpegang pada peraturan yang ada, memastikan ditaatinya ketentuan yang tertuang dalam Statuta Roma tahun 1998, khususnya mengenai pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan yang timbul berdasarkan pedomannya.

Kata Kunci: Statuta Roma 1998, Hukum Normatif, Mahkamah Pidana Internasional

***ARRANGEMENTS FOR DETERMINING FUGITIVE STATUS FOR
SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW REGARDING GROSS HUMAN
RIGHTS VIOLATIONS OF NON-MEMBERS OF THE 1998 ROMAN
STATUTE***

By:

Putu Nandita Utami, NIM 2114101204

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to achieve two primary objectives: (1) to investigate and analyze the regulations concerning the judicial review of the criteria for determining the fugitive status of international law subjects implicated in serious human rights violations who are not members of the 1998 Rome Statute, and (2) to examine the regulations governing individuals who commit crimes against humanity but are not signatories to the 1998 Rome Statute, along with understanding the mechanisms in place for resolving disputes related to serious human rights violations involving these non-member states. To conduct this study, a normative legal research approach was employed, utilizing statutory, conceptual, case, and comparative methods. The analysis is grounded in a combination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this research reveal that (1) the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court possesses the authority to establish the fugitive status of individual international law subjects implicated in serious human rights violations that result in loss and victimization within their respective countries, all while ensuring adherence to the relevant regulations to maintain alignment with the provisions of the Rome Statute; and (2) the mechanism for resolving disputes regarding serious human rights violations among non-members of the 1998 Rome Statute involves establishing strong allegations against the fugitives involved, issuing arrest warrants, and conducting thorough investigations into the alleged violations in accordance with the stipulations of the Rome Statute.

Keywords: Rome Statute 1998, Normative Law, International Criminal Court.